

**ANALISIS PENGARUH LAJU INFLASI DAN PAJAK DAERAH
TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
Pada Tahun 2011-2015)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

**FINA DAIROTUN IMANAH
NIM. 1223203058**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2016**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat.....	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
G. Jadwal Pelaksanaan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Pustaka	11
B. Kerangka Teori	12

	C. Kerangka Pemikiran	47
	D. Hipotesis	47
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Tempat dan Waktu Penelitian	49
	B. Data dan Variabel	49
	C. Teknik Pengumpulan Data	51
	D. Teknik Analisis dan Penelitian	53
BAB IV	ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	57
	B. Hasil Analisis Pembahasan.....	61
	C. Implikasi dalam Ekonomi Islam.....	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN – LAMPIRAN		

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, sosial, politik dan kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang beranekaragam disetiap daerah, sedangkan perekonomian antar masing-masing daerah membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Untuk itu Pemerintah memberikan otonomi pada Pemerintah Daerah yang bertujuan agar daerah tersebut mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar tidak terlalu bergantung pada Pemerintah Pusat, misalkan kebijakan maupun keuangan.

Sebuah konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Upaya meningkatkan pendapatan daerah dapat digali dengan mencari sumber-sumber baru, pendapatan baru dan terus meningkatkan efektivitas serta efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas. Salah satu Pendapatan Daerah yang mempunyai pengaruh cukup besar pada Pendapatan Daerah yaitu Pajak Daerah.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD, yang salah satunya berupa pajak daerah, digarapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dan retribusi daerah yang diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah maupun melaksanakan otonomi, yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Adapun penerimaan pajak daerah dapat dikelola dari pajak propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota diataranya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, BPHTB, Dan PBB Pedesaan dan Perkotaan.

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2015 (rupiah)

Tahun	Realisasi
2011	45.245.652.699
2012	54.752.317.770
2013	111.290.149.783
2014	110.189.330.128
2015	129.678.372.121

Dari data yang didapat dari Dinas Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa realisasi pajak pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2014-2015 yang mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan realisasi pajak di wilayah KPP Pratama Purwokerto pada tahun

2013 lalu, masih perlu ditingkatkan. Kepala KPP Pratama Purwokerto Mulyono Marsandi dalam acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan 2014 di pendopo Setda Banyumas, Selasa (25/03), menyebutkan realisasi pajak tahun 2013 baru mencapai 83 persen. Dia merinci, berdasarkan data yang ada di kantornya, jumlah wajib pajak yang di wilayah Banyumas tercatat ada sebanyak 12 ribu wajib pajak. Dari jumlah wajib pajak tersebut, pendapatan pajak yang diperoleh bisa mencapai Rp 590 miliar. Namun dalam realisasinya, pendapatan pajak yang diperoleh hanya mencapai 83 persen. "Untuk itu, kami membutuhkan dukungan serta bantuan dari semua unsur pimpinan daerah beserta jajaran, khususnya kerjasama dari masyarakat sebagai wajib pajak. Kasi Pengawasan KPP Pratama Purwokerto, Abdul Mungid, mengakui tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih kurang. Hal ini terbukti dari penerimaan pajak tahun 2013 yang hanya mencapai sekitar 83 persen."

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas tahun 2011-2015 (rupiah)

Tahun	Realisasi
2011	178.277.815.905
2012	200.195.910.699
2013	294.865.867.582
2014	317.143.185.866
2015	387.155.151.353

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas tahun ke tahun semakin berkembang diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas. Adanya restoran-restoran, hotel-hotel, tempat-tempat pariwisata,

¹Republika.co.id.Banyumas

lembaga-lembaga keuangan baik itu perbankan atau non bank, yang didirikan di daerah Banyumas semakin mendukung berkembangnya perekonomian di Kabupaten Banyumas.

Laju inflasi yang mungkin dapat berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, laju inflasi menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan turunnya nilai mata uang, yang menyebabkan berkurangnya minat seseorang untuk menginap di Hotel, makan di Restoran mewah atau daya beli masyarakat terhadap barang-barang konsumsi, disisi lain mengakibatkan keuntungan yang diperoleh daerah akan menurun, sehingga menurunkan penerimaan pajak hotel juga akan menurun yang otomatis akan berdampak pada pendapatan daerah.

Seperti yang pernah terjadi inflasi di daerah Purwokerto bulan Juli tahun 2012 merupakan inflasi tertinggi se-Jateng pada saat itu. Angka Inflasi pada bulan Juli 2012 mencapai 0,84 %, sedangkan angka Inflasi di tingkat Jawa Tengah hanya 0,71 %. Kenaikan harga bahan makanan, biaya kesehatan yang menurunkan daya beli masyarakat.²

Tabel 1.3 Data Inflasi Per Bulan Di Kabupaten Banyumas Pada Tahun 2011-2015

Bulan	Tahun (%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jan	1,00	0,95	0,68	1,63	0,82
Feb	0,45	0,18	0,56	0,40	0,51
Mar	-0,34*	-0,43*	-0,21*	0,44	0,08
Apr	0,05	-0,18*	0,09	-0,17*	-0,08*
Mei	0,25	0,25	0,43	0,06	0,08
Jun	0,92	0,31	0,33	1,48	0,48
Jul	1,21	0,72	0,84	2,84	0,82

² <http://m.antaranews.com/berita/325235/inflasi-di-purwokerto-tertinggi-se-jateng>

Ags	0,60	0,45	0,85	1,08	0,43
Sep	0,38	0,25	0,17	-0,71*	-0,24*
Okt	0,28	0,23	0,29	0,88	0,41
Nov	0,56	0,56	0,08	0,04	1,38
Des	0,52	0,07	0,53	0,29	2,00

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas “*Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2011-2015*”

*Catatan : Deflasi

Dengan dasar penelitian yang kami ambil berjudul “*Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sumedang*” oleh Rina Rahmawati Ruswandi Institut Pertanian Bogor (2009) dengan hasil Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai PAD di Kabupaten Sumedang.³

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul di atas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, berikut ini penulis sajikan mengenai penegasan istilah:

1. Laju Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi yaitu penurunan harga secara terus menerus akibatnya daya beli masyarakat akan lebih besar sedangkan pada tahap awal barang-barang akan menjadi langka, akan tetapi pada tahap berikutnya jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat.⁴

³Rina Rahmawati Ruswandi, *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sumedang*, Institute Pertanian Bogor 2009.

⁴ Boediono, *Ekonomi Moneter Edisi 3*, (Yogyakarta :BPFE Yogyakarta, 2001), hlm. 47

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.⁵

3. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU. No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.⁶

4. Daerah Banyumas

Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari wilayah budaya Banyumasan, yang berkembang di bagian Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km² atau setara dengan 132.759,56 ha. Banyumas memiliki beberapa tempat wisata andalan antaranya Baturaden, Telaga Sunyi, Mata Air Panas Kalibacin, Bendung Gerak

⁵Marsyahrl Tony, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm.2

⁶ Ibid

Sunyi, Wahana Wisata Lembah Cobong, Batur Agung Adventure Forest dll.⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah laju inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Banyumas ?
2. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Banyumas ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas , maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh laju inflasi terhadap penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Banyumas
- b. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap keilmuan Ekonomi Pembangunan.

b. Manfaat Praktis

⁷ http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Banyumas

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan tolak ukur di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

1) Bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyumas

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak untuk menambah jumlah pajak daerah pada Kabupaten Banyumas sekaligus memperhatikan laju inflasi pada Kabupaten Banyumas. Dengan bertambahnya pajak daerah secara tidak langsung akan menambah penerimaan PAD, sehingga dapat menunjang perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi peneliti, dan dari penelitian ini peneliti berharap bisa memperkaya pengetahuan tentang Pengaruh Laju Inflasi dan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Banyumas.

3) Bagi Dunia Akademis

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan acuan

untuk penelitian-penelitian mendatang terutama yang berkaitan dengan Pengaruh Laju Inflasi dan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Banyumas.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kajian pustaka dan beberapa teori yang dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran teori atau landasan penelitian.

IAIN PURWOKERTO

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang populasi, sampel dan sampling, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum tempat penelitian, gambaran umum responden, hasil analisis data, analisis data penelitian, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan laju inflasi terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD). Data - data yang menyangkut penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pendapatan Daerah berada di Purwokerto.

Sampel penelitian pada Kabupaten Banyumas dengan data yang diteliti selama 5 tahun (tahun 2011-2015).

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laju Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari kesimpulan di atas mendukung serta memperkuat penelitian sebelumnya oleh yang dilakukan oleh Rina Rahmawati Ruswandi Institut Pertanian Bogor (2009) dengan hasil Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai PAD di Kabupaten Sumedang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas

a. Inflasi

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa inflasi Kabupaten Banyumas merupakan inflasi tertinggi se Jateng pada tahun 2013, maka perlu diperhatikan keseimbangan ekonomi di Kabupaten Banyumas. Memang pada tahun 2013, inflasi yang terjadi tidak memberi pengaruh terhadap PAD namun tidak menutup kemungkinan juga apabila hal tersebut dibiarkan tanpa adanya tindak lanjut inflasi dapat berpengaruh terhadap PAD.

Dalam inflasi perspektif ekonomi islam terdapat dua macam inflasi yaitu *natural inflation* dan *human eror inflation*. Kaitannya dalam penelitian yang membahas tentang pengaruh inflasi dan pajak daerah terhadap PAD. Sebenarnya inflasi dan pajak daerah terdapat kaitan salah satunya penyebab penurunan suatu pajak yang biasa terjadi yakni *human eror inflation*. Oleh sebab itu perlu diperhatikan lagi sistematika dan administrasi pada pajak daerah.

b. Pajak Daerah

Pemerintah Daerah sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya PAD maka akan semakin mudah untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan meningkatkan

kinerja pemerintahan daerah. Selain itu, dengan peningkatan PAD diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Peningkatan PAD harus didukung pula oleh peningkatan kualitas dari para pejabat pemerintahan daerah. Dengan demikian pajak daerah dapat disalurkan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai penunjang adanya peningkata pajak daerah, perlu diadakan sosialisasi dan pengarahan terhadap masyarakat pada umumnya, agar permasalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya tentang penurunan PBB di Kabupaten Banyumas tidak terjadi lagi.

Selain itu semua perlu diadakan sosialisasi mengenai potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas, sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui dan investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya. Contoh sosialisasi mengenai potensi daerah wisata, potensi daerah perkebunan, maupun potensi industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Banyumas.

2. Bagi peneliti lain

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Dan untuk memperjelas signifikasi pengaruh PAD sebaiknya penerimaan daerah lainnya selain pajak daerah juga dijabarkan sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruhnya secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, 2006 *Metodologi Penelitiandan Teknik Penyusunan Skripsi*(Jakarta: Rineka Cipta)
- Bawono, Rangga, Icuk dan Novelsyah, Mochamad, 2012 *Perpajakan Untuk Bendaharawan* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN)
- Boedino, 1982 *Ekonomi Makro Edisi Keempat* (Yogyakarta, BPFE Yogyakarta)
- Sadono, Sukirno 2007 *Makroekonomi Modern*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada)
- Boediono, 2001 *Ekonomi Moneter Edisi 3*, (Yogyakarta :BPFE Yogyakarta)
- Dina Anggreani, *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD (Studi Empiris Pada Provinsi Bengkulu)*, Universitas Negeri Islam Syrif Hidayatullah Jakarta 2010.
- Gusfahmi, 2007 *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
- Hasan, “*Pengaruh Kualitas Jasa Bank Syari’ah Terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang*”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1 April 2006, h. 1 – 14
- Husein Umar, 2005 *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Huda Nurul, 2008 *Ekonomi Mikro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana)
- Karim, Adiwarmam, 2011, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Mudrajad Kuncoro, 2007 *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Ketiga (Yogyakarta: YKPN)
- Marsyahrul Tony, 2005 *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: PT Grasindo)
- Muhamad, 2004, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta:BPFE)
- Mardiasmo, 2008 *Perpajakan*, (Yogyakarta : ANDI)
- Nopirin, 2000 *Ekonomi Moneter Buku 2 Edisi Pertama*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta)
- Tjahjono Achmad, Husen Fakhri Muhammad, 2005 *Perpajakan*, (Yogyakarta: YKPN)

Qusnul Khatimah, *Analisis Potensi Dan Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan PAD (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Asset Kota Mojokerto)* Universitas Brawijaya 2014.

Reksopayitno, Soediyono, 1995 *Ekonomi Makro Analisa IS-LM dan Permintaan Penawaran Agregari*, (Yogyakarta: Liberty)

Rianto Adi, 2005 *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi I (Jakarta: Granit,)

Rina Rahmawati Ruswandi, 2009 *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sumedang*, Institute Pertanian Bogor.

Saifudin Azwar, 1998 *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Supramono, Damayanti Woro Theresia, 2005 *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: ANDI)

Simanjuntak Hamonangan Timbul, Mukhlis Imam, 2012 *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan*, (Jakarta: RAS Jakarta)

Suharsimi Arikunto, 2000 *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta)

Sadono, Sukirno, 2007 *Makroekonomi Modern*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada)

Warto, Isna Alizar, 2012 *Analisis Data Kuantitatif*, (Purwokerto: STAIN PRESS)

<http://m.antaranews.com/berita/325235/inflasi-di-purwokerto-tertinggi-se-jateng>

http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Banyumas

<http://sonnylazio.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html?m=1hlm.100-105>

Republika.co.id.Banyumas